

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN ( DARING ) PADA  
MASA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020.**

**SKRIPSI**

**( STUDI SMAN 3 SAPE )**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu ( S1 )

ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH**

**AGUS**

**NIM. 217130039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN  
(DARING) PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI SMAN 3  
SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

Oleh :

**AGUS**

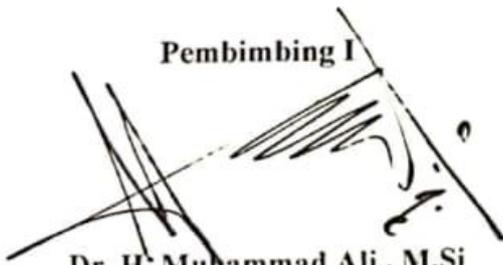
**NIM : 217130039**

Untuk memenuhi ujian skripsi  
Pada tanggal 14 Agustus 2021

**Menyetujui:**

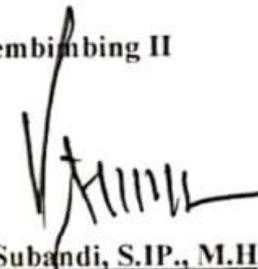
**Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. H. Muhammad Ali., M.Si**  
**NIDN.0806066801**

**Pembimbing II**



**Azwar Subandi, S.IP., M.H**  
**NIDN.0818018101**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Ilmu Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
**NIDN.0816057902**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN  
(DARING) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMAN 3  
SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

Oleh :

**AGUS**

**NIM : 217130039**

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 14 Agustus 2021

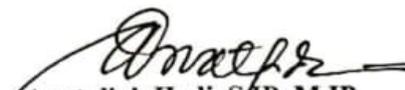
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Kelulusan

**Tim Penguji :**

1. Dr. H. Muhammad Ali., M.Si (PU)  
NIDN. 0806066801
2. Azwar Subandi, S.IP., MH (PU)  
NIDN.0818018101
3. Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom (PN)  
NIDN.0831128310



**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

  
Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP  
NIDN.0816057902

**Mengesahkan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

  
(Dr. H. Muhammad Ali., M.Si)  
NIDN. 0806066801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa penulis Skripsi “**Kebijakan Pembelajaran Dalam Jaringan ( Daring ) Pada Masa Pandemi *vocid-19* di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima Tahun 2020**” Bertanda Tangan di bawah ini atas nama :

NAMA : AGUS

NIM : 217130039

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Menyatakan bahwa benar Skripsi tersebut merupakan hasil karya tulis sendiri bukan hasil plagiasi/mengklaim Hasil karya tulis orang lain. Apabila terbukti pernyataan ini salah maka penulis siap menerima konsekuensi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Mataram, Rabu 22 September 2021

**PENULIS**  
  
**AGUS**

**NIM : 217130039**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus.....  
 NIM : 217130039.....  
 Tempat/Tgl Lahir : Buncu Sape 18 Mei 1996.....  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan.....  
 Fakultas : FISIPOL.....  
 No. Hp : 082 340 688 611.....  
 Email : [juraganagus09@gmail.com](mailto:juraganagus09@gmail.com).....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

*Kebijakan Pembelajaran <sup>Daring</sup> Jaringan (Daring) Pada masa pandemi covid-19 Di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima*

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 September 2021  
 Penulis



Agus  
 NIM. 217130039

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.idr.ummatas.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummatas.ac.id](mailto:perpustakaan@ummatas.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus.....  
 NIM : 217130039.....  
 Tempat/Tgl Lahir : Buncu. Sape, 18 Mei 1996.....  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan.....  
 Fakultas : FISIPOL.....  
 No. Hp/Email : 082 340 688 611.....  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Kebijakan Pembelasan Dalam Jaringan (Daring).....  
 Pada masa Pandemi Covid-19 di SMAN 3 Sape.....  
 Kabupaten Bima.....

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 September 2021  
 Penulis



Agus  
 NIM.217130039

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

## RIWAYAT PENELITIAN



Nama Agus, lahir di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 Mei 1996. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Imran Mahmud dan Ibu Janibah.

Latar belakang pendidikan peneliti yaitu lulusan Sekolah Dasar di SDN IMPRES Buncu, Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima, lulusan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Sape Kabupaten Bima, lulusan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2017 di perguruan tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Mataram, mengambil Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama masa perkuliahan peneliti aktif di organisasi Tapak Suci Putera Muhammadiyah, pernah menjabat sebagai sekretaris organisasi Tapak Suci tahun 2020-2021. Masa perkuliahan peneliti tempuh dengan delapan semester selama empat tahun perkuliahan.

**MOTTO**

**JIKA ANDA BERMIMPI INGIN SUKSES MAKA BANGUN DAN  
WUJUDKANLAH MIMPIMU ITU**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat yang dilimpahkannya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kebijakan Pembelajaran Dalam Jaringan ( Daring ) pada Masa Pandemi Covid-19 di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima Tahun 2020" peneliti membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan ( S.IP ).

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki peneliti, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan penepatan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar penelitian ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dedy Iswanto, S.T., MM dan Wakil Dekan 2 Bapak Amin Saleh, S.Sos, M.Si.
3. Bapak Ayahtullah Hadi. S.IP, M.IP Selaku ketua program Studi Ilmi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP Selaku sekretaris program Studi Ilmi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Azwar Subandi, S.IP., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
7. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu tersayang atas doa-doanya dan motivasi serta dukungan yang selalu menyertaiku didalam setiap langkahku.
8. Kaka serta Adik-adikku tersayang ( kakak Nursusanti Imran, Ratih Imran, Wiranti Imran dan Rasti Imran ) yang selalu memberikan dukungan serta menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Yeni Helmalia Putri yang selalu ada menemani serta memberiku semangat dan motivasi setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, , Rabu 22 September 2021

Peneliti

Agus

NIM. 217130039

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DALAM JARING ( DARING ) PADA  
MASA PANDEMI *COVID-19* DI SMAN 3 SAPE KABUPATEN BIMA**

**TAHUN 2020**

Agus, Muhammad Ali, Azwar Subandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram.

**ABSTRAK**

Kebijakan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi *covid-19* ini. Merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona, dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring ini dapat mencegah penyebaran virus corona, dikarena virus corona sangat cepat sekali melunar. Dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring banyak sekali memiliki faktor-faktor baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukungnya. Hasil penelitia menunjukkan bahwa : kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi *covid-19* di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima, dilaksanakan secara daring agar penanganan penyebaran virus dapat teratasih dalam pelaksanaan pembelajaran daring memanfaatkan beberapa aplikasi seperti *google meet*, *google croom*, *google zoom* dan *whatsapp*. Penggunaan rencana pelaksanaan pembelajaran, satu lembar dan evaluasi lembaran tertulis yang dikumpulkan disekolah, faktor penghambat dalam kebijakan pembelajaran daring yaitu : kurannya efektifas dan efesiensi waktu dan minimnya antusias dan pemahaman siswa/siswi dalam memahami pelajaran yang diberikan, dan faktor pendukung dalam pembelajaran daring ini adalah adanya bantuan dari sekolah berupa Wifi untuk Guru-guru agar bisa memberi dan menerima tugas ke siswa/siswi serta ada bantuan dari pemerintah yaitu dari kemendikbud sebesar 12 GB perbulannya.

**Kata Kunci : Kebijakan, pembelajaran dalam jaringan**

# ONLINE LEARNING POLICY DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT SMAN 3 SAPE, BIMA REGENCY IN 2020

Agus, Muhammad Ali, Azwar Subandi  
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,  
Muhammadiyah University of Mataram.

## ABSTRACT

Due to the corona virus spreads swiftly, the government's online learning policy during this covid-19 pandemic is one of the methods taken by the government to break the chain of the virus's propagation by conducting online teaching and learning activities to prevent the virus's spread. Many elements, both restricting and supportive, play a role in the adoption of online learning policy. The findings revealed that during the covid-19 pandemic, the online learning policy at SMAN 3 Sape, Bima Regency, was implemented online so that the handling of the virus's spread could be resolved through the use of several applications such as Google Meet, Google Classroom, Zoom Meeting, and Whatsapp. The following are the constraining elements in online learning policies: the usage of learning implementation plans, one sheet, and evaluation of written sheets collected in schools; a lack of effectiveness and efficiency in terms of time management, as well as a lack of excitement and understanding among students in terms of the lessons taught, and there is assistance from schools in the form of Wifi for teachers so that they can be members and accept student assignments, as well as assistance from the government, specifically the Ministry of Education and Culture, which provides 12 GB each month.

**Keywords: policy online learning**



## DAFTAR ISI

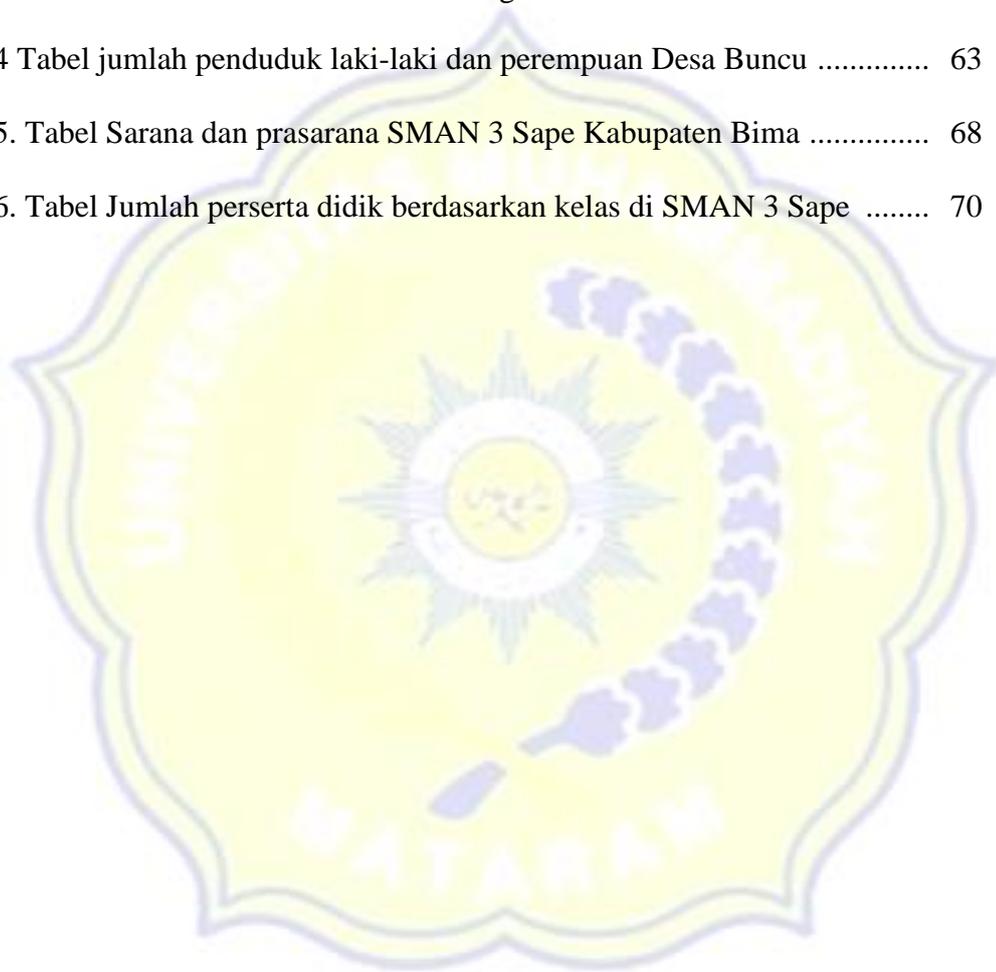
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT PENELITI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1.Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2.Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3.Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4.Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	<b>10</b>
1.4.2. Manfaat Praktis .....	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	<b>11</b>
2.2. Pendidikan .....	<b>14</b>
2.2.1. Definisi Pendidikan .....	<b>14</b>
2.2.2. Tujuan Pendidikan .....	<b>16</b>
2.3. Pembelajaran Daring .....	<b>17</b>
2.3.1. Definisi pembelajaran Daring .....	<b>17</b>
2.3.2. Manfaat Pembelajaran Daring .....	<b>20</b>
2.3.3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .....	<b>21</b>

2.4. Kebijakan publik .....	24
2.4.1. Definisi kebijakan publik .....	24
2.4.2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan .....	27
2.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan .....	32
2.4.4. Urgensi Kebijakan Publik .....	33
2.5. Kerangka Berpikir .....	34
2.6. Definisi Konseptual .....	35
2.7. Definisi Oprasional .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	37
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.2.1. Lokasi Penelitian .....	37
3.2.1. Waktu Penelitian .....	37
3.3. Tehnik Pengumpulan Data .....	37
3.3.1. Observasi .....	38
3.3.2. Wawancara .....	38
3.3.3. Dokumentasi .....	39
3.4. Sumber Data .....	39
3.4.1. Sumber Data Primer .....	39
3.4.2. Sumber Data Sekunder .....	40
3.5. Tehnik Analisa Data .....	40
3.5.1. Reduksi Data .....	40
3.5.2. Display .....	41
3.5.3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Buncu .....	42
4.1.1. Sejarah Desa Buncu .....	42
4.1.2. keadaan sosial dan budaya masyarakat .....	43
4.2. Gambaran Umum Lokasi penelitian di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	48
4.2.1. Identitas Sekolah SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	48

4.2.2. Kondisi geografis SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	49
4.2.3. Visi, Misi dan tujuan SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	49
4.2.4. Struktur Organisasi SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	51
4.2.5. Sarana dan Prasarana SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	52
4.2.6. Jumlah Siswa/siswi SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	55
4.3. Hasil Penelitian .....	56
4.3.1. kebijakan Pembelajaran Daring pada masa pandemi <i>covid-19</i> di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	56
4.3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Kebijakan Pembelajaran Daring pada masa pandemi <i>covid-19</i> di SMAN 3 Sape kabupaten Bima .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
5.1. Kesimpulan .....	76
5.2. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	

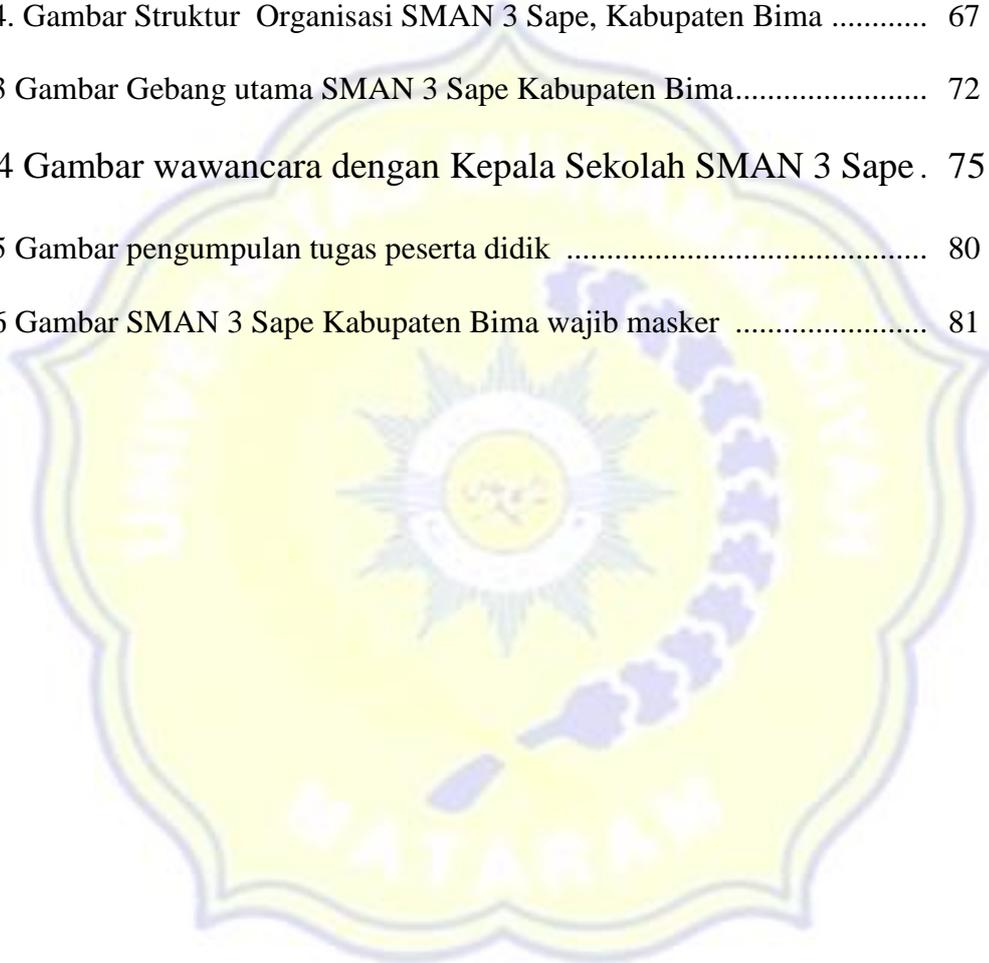
## DAFTAR TABEL

2.1. Tabel 1 penelitian terdahulu .....	16
4.1. Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian/pekerjaan .....	59
4.2 Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Agama .....	61
4.3 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	62
4.4 Tabel jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Buncu .....	63
4.5. Tabel Sarana dan prasarana SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	68
4.6. Tabel Jumlah peserta didik berdasarkan kelas di SMAN 3 Sape .....	70



## DAFTAR GAMBAR

2.1. Gambar kerangka berpikir .....	48
4.1 : Gambar Lapangan serta Gedung SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	60
4.2 Gambar Visi, misi dan tujuan SMAN 3 Sape Kabupaten Bima .....	66
4.4. Gambar Struktur Organisasi SMAN 3 Sape, Kabupaten Bima .....	67
4.3 Gambar Gebang utama SMAN 3 Sape Kabupaten Bima.....	72
4.4 Gambar wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 3 Sape .	75
4.5 Gambar pengumpulan tugas peserta didik .....	80
4.6 Gambar SMAN 3 Sape Kabupaten Bima wajib masker .....	81





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam hal itu, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 (ayat 1), pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potesih dirinya untuk memiliki kekuatan spriktual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang memerlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini, disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan metode pembelajaran Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Pendidikan nasional seharusnya memiliki srtategis Pembaharuan system. : a). pelaksanaan pendidikan akhlak mulia beserta agama yang baik; b).pelaksanaan kurikulum dan pengembangan berbasis kompetensi; c). dialogis dan pendidikan dalam proses pembelajaran; d). evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; e). peningkatan ke profesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; f). penyediaan sarana belajar yang mendidik; g). pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; h). penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; i). pelaksanaan wajib belajar; j). pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; k). pemberdayaan peran masyarakat; l). pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan m). pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional Dengan strategis tersebut diharapkan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas agar bangsa kita mempunyai SDM yang ahli, terampil, kreatif dan inovatif. Kualitas SDM ini sangat diperlukan jika Indonesia ingin menjadi negara yang berhasil menguasai, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan industrialisasi sehingga mampu menghadapi persaingan Global.

Kebijakan publik suatu alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorangan atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (tool) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaanya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah persyaratan atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang di kehendaki. Noeng Muhadjir (2000:15) kebijakan publik merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni: (1). Tingkat kehidupan masyarakat meningkat, (2). Terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan keraktifitas individual, (3). Diberikan peluang aktif paratisipasi masyarakat (dalam membahas masalah,

perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4). Terjadinya pengembangan berkelanjutan.

Dari penjelasan berkaitan dengan kebijakan publik diatas bahwasannya suatu kebijakan publik dibuat melalui adanya suatu permasalahan yang terjadi baik itu masalah yang bisa di atasi secara cepat maupun suatu masalah yang sangat sulit di atasi, bukan masalah itu saja kebijakan publikpun memiliki peran penting dalam dunia pendidikan yaitu memiliki tujuan tertentu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

Korban pertama yang terjangkit virus ini adalah seseorang yang berusia 55 tahun dia berasal dari provinsi Hubei china, dia merupakan dagan pertama yang tertular disebabkan oleh corona telah penyebaran begitu sangat cepat keseluruh dunia. Kasus ini terjadi sekitar pada tanggal 17 November 2019. Setelah terlusuri lebih dalam ternyata virus ini telah ditemukan khusus baru yang dilaporkan setiap hari, belum segenap satu bulan pada 15 desember, total yang terifenksi telah mencapai sekitar 27 khusus baru, kita bisa melihat dari kurang waktu yang begitu cepat virus ini telah mencapai 60 khusus baru pada tanggal 20 desember dan pada tanggal 27 desember kepala depertemen pernapasan dirumah sakit provisi Hubei, telah melaporkan kepada pejabat kesehatan di cina, bahwa virus corona pada hari itu tlah mencapai lebih dri 180 orang. Dan kini virus corona itu telah memasuki daerah asean Termasuk Negara Indonesia.

Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan atau kebijakan terkait penanganan *covid-19* ini. dalam rangka menjamin kepastian hukum, pengawasan dan peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019 (*covid-19*) diseluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019 (*covid-19*). Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti inpres Nomor 6 Tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020 tentang tim koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan penyakit *virus corona* 2019 di daerah, melalui kepmendagri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020 tersebut, sebagai langkah cepat diperlukan sesuai tugas, fungsi dalam menjamin kepastian hukum, upaya-upaya dan meningkatkan pencegahan dan pengendalian virus corona penyakit 2019 (*covid-19*) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di indonesia.

Adapun peraturan dari Gubernur NTB No: 22 Tahun 2020 tentang pedoman umum penanganan *covid-19* .a). bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka mempercepat penanganan corona virus disease 2019 (*covid-19*) perlu dilakukan Langkah-langkah antisipasi dan percepatan penanganan pandemi *covid-19* di Nusa Tenggara Barat. b). bahwa untuk memudahkan pelaksanaan langkah-langkah antisipasi dan percepatan dimaksud perlu

disusun pedoman sebagai acuan bagi gugus depan, di setiap perangkat daerah stakeholder dalam menentukan kebijakan, tindakan dan langkah-langkah strategis.

Kabupaten Bima saat ini termasuk beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia yang peningkatan jumlah kasus *covid-19* yang sangat meningkat. Pemkab Bima NTB memberlakukan jam malam setelah berdasarkan hasil tes swab 10 warga kecamatan Bolo dan Sanggar dinyatakan positif terjangkit virus corona (*covid-19*). Pemberlakuan jam malam dilaksanakan mulai Rabu (22/4/2020). Bupati Bima, HJ, Indah Dhamayanti Putri, SE, mengeluarkan surat instruksi Nomor 360/007/06.23 Tahun 2020, tentang percepatan penanganan virus corona (*covid-19*) di Kabupaten Bima.

“Surat instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh tim gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa di Kabupaten Bima. Bupati Bima mengatakan pemberlakuan jam malam sebagai bentuk tindak lanjut atas peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana “adanya peningkatan status ini perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya pencegahan virus corona. Untuk itu, bupati meminta tim gugus tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembatasan waktu aktivitas warga di mulai pukul 22.00 sampai dengan 05.00 Wita. Jam malam ini diberlakukan mulai pukul 22.00 Wita, tidak ada lagi aktivitas warga di Kabupaten Bima diluar rumah, selain itu Bupati Bima memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap

tenang dan tidak panik. Serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan himbuan pemerintah.

Masyarakat juga diimbau agar wajib menggunakan masker saat berada di tempat umum ketika melakukan pembatasan aktivitas ibadah secara berjamaah berkelompok disemua tempat. Bagi pendatang baru yang masuk di wilayah kabupaten bima agar wajib melakukan isolasi mandiri. Masyarakat yang baru datang wajib melaporkan kondisi kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila himbuan tersebut tidak di tindakan dan tidak ditaati oleh masyarakat, maka Bupati Bima meminta tim gugus depan agar melakukan pembinaan serta menindak tegas.

Ada beberapa kecamatan yang berada di kabupaten bima menerapkan kebijakan serta peraturan yang dikeluarkan oleh presiden, menteri dalam negeri gubernur bahkan peraturan dari bupati bima itu sendiri, Kecamatan Sape salah satunya, yang dimana menurut informasi dari camat sape bahkan dari beberapa warga disana. Ada beberapa orang yang kini terjangkit virus corona (*covid-19*) sehingga daerah kecemat tersebut mengeluarkan peraturan/kebijakan agar semua aktifitas yang dilakukan masyarakat tidak melanggar protokol kesehatan. Dan daerah tersebut mewajibkan kepada seluruh masyarakatnya agar tetap menggunakan masker, jaga jarak dan menghindari keramaian seperti contohnya acara adat, respresi pernikahan tidak diadakan, bukan hanya dalam beberapa hal tersebut pemerintah kecematan sape pun mengeluarkan kebijakan agar disumua pendidikan khususnya di SMAN 3 Sape agar proses ataupun kegitan belajar mengajarnya harus dilakukan secara daring (*online*).

Karena sekolah tersebut memiliki jumlah siswa/siswi yang begitu banyak, di kelas 1 saja SMAN 3 Sape memiliki 6 kelas disetiap kelasnya memiliki jumlah 35 orang perkelas bila digabungkan menjadi 218 orang dan kelas 2 memiliki jumlah siswa/siswi yang banyak juga dalam 6 kelas mencapai jumlah 210 orang, selain dari kelas 1 dan 2 yang memiliki jumlah siswa/siswi yang begitu banyak kelas 3 juga tidak kalah banyak siswa/siswinya sekitar 202 orang dalam 6 kelas tersebut, bila kita jumlahkan dari kelas 1,2 dan sampai kelas 3 jumlah siswa/siswinya mencapai 630 orang.

Tidak heran juga kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini agar penyebaran virus tidak cepat menular, pemerintah daerah memutuskan agar sekolah tersebut melakukan kegiatan belajar mengajarnya harus secara daring (*online*). Dalam proses pembelajaran secara daring (*online*) ini memberikan banyak sekali dampak, mulai dari dampak positif bahkan hingga dampak negatif. Pembelajaran secara daring.

Pandemi *covid-19* yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas. Sehingga belajar yang awalnya dilakukan dengan bertatap muka langsung di kelas harus beralih dengan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Hal ini tentu saja memberikan dampak pada pembelajaran di SMAN 3 Sape, pembelajaran yang tidak dapat terlaksanakan sesuai dengan RPP, banyaknya peserta didik yang mengeluh karena terlalu banyak tugas, dan orangtua mengalami kesulitan dalam mendampingi kegiatan belajar anak, sehingga diperlukan gambaran implementasi pembelajaran pada saat pandemi *Covid-19* agar pembelajaran

dapat terlaksana dengan baik lagi. Dalam hal ini maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat suatu penelitian tentang *covid-19* ini yang dimana judul penelitian ini yaitu mengetahui kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi *Covid-19* di SMAN 3 Sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1). Bagaimanakah kebijakan pembelajaran (daring) pada masa pandemi *covid-19* di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima?.
- 2). faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi *covid-19* di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima?.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ;

- 1). Untuk mengetahui Bagaimanakah kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi *covid-19* di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima?.
- 2). Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi *covid-19* di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima?.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1). Manfaat teoritis**

- a). Untuk meningkatkan wawasan keilmuan tentang kebijakan pembelajaran dalam jaringan (daring) pada masa pandemi *covid-19* di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima.
- b). Untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi mutu pendidikan secara baik dan maksimal.
- c.) Dapat digunakan sebagai bacaan bagi peneliti terkait dengan kebijakan pembelajaran daring.

### **1.4.2). Manfaat paraktis**

- a). Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar serta memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin.
- b). Penelitian ini diharapkan untuk menumbuhkan minat belajar dan mendorong siswi/siswa lebih agar mandiri belajar dari rumah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah acuan yang dilakukan oleh peneliti sebagai salah satu metode serta berkarya dalam mengkaji teori. Dari penelitian terdahulu peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Isnawati Nona, 2018	Bagaimana tentang implementasi program IT ( <i>E-learning</i> ) dalam menumbuhkan literasi digital di SD Muhammadiyah Condongcatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mengakses e-learning ini menggunakan akun mereka masing-masing dan siswa sangat tertarik belajar dengan memanfaatkan TIK ini.
2.	Narenra Putra Angga, 2020	Implementasi Pembelajaran Pjok Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di SDN Se-Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewah yongjakarta.	Adapun penjelasan dari beberapa indikator tersebut. 100% guru tetap memberikan pelajaran PJOK, 66,7% guru menggunakan metode pembelajaran daring, 100% menggunakan media pembelajaran whatsapp grup, dan 94% peserta antusias dan partisipasi baik dalam pembelajaran.
3.	Putra Krismadika Arwidana, 2020	Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi <i>Covid-19</i> di SD IT	Guru tetap dapat memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran dengan memberikan video call kepada siswa melalui

		AL-HUDA Wonogiri	motivasi dan menjadi lebih inovatif ketika membuat bahan ajar dengan tujuan mendapatkan antusiasme dari siswa walaupun terjadi beberapa kendala dalam proses pembelajaran.
--	--	------------------	--

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tiara Cintasih. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembelajaran daring pada masa pandemi *covid-19*. Sedangkan perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah pada objek penelitian ini mengambil suatu khusus yang berada di daerah kabupaten Bima, kecamatan Sape khususnya di SMAN 3 Sape dan membahas keseluruhan di sekolah tersebut. Sedangkan penelitian dari Tiara Cintasih berada di Kelas III SD PTQ Annida Kota Salatiga. Dan lebih fokus dalam satu kelas saja tidak membahas secara luas di sekolah tersebut.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Angga narenra putra. Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi pembelajaran daring pada masa *covid-19*, menggunakan media pembelajaran whatsapp grup dan peserta antusias dan partisipasi baik dalam pembelajaran. Sedangkan perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah pada objek penelitian yang dimana penelitian terdahulu fokus ke peran guru, metode pembelajaran dan lebih fokus ke pembelajaran Pjok dan studi khusus yang berbeda di SDN Se-Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini membahas secara khusus di satu sekolah yaitu di SMAN 3 Sape kabupaten Bima.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Arwidana Putra Krismadika, Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas terkait dengan implementasi pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi, memberikan motivasi kepada siswa melalui video call dan menjadi lebih inovatif ketika membuat bahan ajar dengan tujuan mendapatkan antusiasme dari siswa walaupun terjadi beberapa kendala dalam proses pembelajaran, sedangkan perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah pada objeknya penelitian terdahulu yaitu studi khususnya di SD IT AL-HUDA Wonogiri sedangkan penelitian ini studi khususnya di SMAN 3 Sape Kabupaten Bima, dan lebih fokus ke implementasi kebijakan pembelajaran. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Nona Isnawati.

Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas terkait dengan bagaimana tentang implementasi dan siswa harus menggunakan akun sendiri dalam mengakses ataupun mengupload tugas kegurunya masing-masing. Sedangkan perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah pada objeknya penelitian terdahulu yaitu lebih dalam membahas tentang program IT (*E-learning*) dalam menumbuhkan literasi digital di SD Muhammadiyah Condongcatur. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimanakah kebijakan pembelajaran daring pada masa *covid-19* di SMAN 3 Sape.

## **2.2. Pendidikan**

### **2.2.1. Definisi Pendidikan**

Berbicara manusia dan Undang-Undang berarti kita berbicara mengenai pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang Pendidikan Nasional yang dimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Disini pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negaranya, melalui pendidikan tentu masyarakat akan mendapatkan pelatihan serta ilmu pengetahuan baik dalam berhubungan sosial, politik, beragama dan berakhlak mulia, dan memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing yang tinggi.

Pengertian mengenai pendidikan tersebut, dapat dilihat dari sisi beberapa titik sudut pandang yang berbeda-beda antara dari titik sudut psikologis maupun segitiga pandang sosiologis. Terdapat banyak pengertian maupun definisi yang membahas mengenai pendidikan, tergantung dalam melihat pendidikan melalui titik sudut manapun. Akan tetapi dalam inti sari mengenai pemaknaan konsep pendidikan mengarah dalam satu tujuan yaitu suatu upaya yang dijadikan proses untuk membina diri seseorang maupun masyarakat secara umum supaya dapat menjembatani langkah-langkah dalam menjalani kehidupan sehingga bisa meraih hidup yang diimpikan oleh semua orang yaitu menikmati kehidupan serba dilandasi

pengetahuan dan hidup sejahtera, semua kebutuhan terpenuhinya dengan munculnya ide kreatif dan inovasi yang hanya bisa didapatkan dengan proses mengenyam pendidikan.

Munurut Ki Hajar dewantara sebagai bapak pendidikan nasional Indonesia mengatakan bahwa pendidikan tersebut adalah merupakan tuntunan didalam hidup tumbuh nya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntut segala kuadrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Para masyarakat mengartikan pendidikan pengajaran yang dilakukan disekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau didikan formal. Jadi pendidikan tidak seluruhnya terjadi di sekolah tetapi pendidikan bisa jadi di rumah yang mana orang tua yang menjadi gurunya.

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan masyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia kita dapat memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, ke disiplinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam pendidikan di Indonesia pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di Sekolah-Sekolah Dasar, SMP bahkan di SMA, melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara memecahkan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat. Demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh harapan dan poerkatja. Pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Yang dimaksud orang tua tersebut adalah orang tua anak itu atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik tersebut seperti guru dan seorang kiyai. Pendidikan akan memberikan nilai positif bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan menyiapkan generasi yang baik dan bagus bagi negaranya.

### **2.2.2. Tujuan Pendidikan**

Indonesia Negara yang begitu besar memiliki keragaman dan kebudayaan yang berbeda-beda tentu disini Indonesia memiliki tujuan baik dalam peningkatan perekonomian, sumber daya manusia dan tanpa terkecuali tujuan dalam bidang pendidikan. Telah tertuang dalam Undang-Undang pasal 31 ayat 5 yaitu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara kesatuan republik Indonesia. Dan tujuan lain dalam pendidikan nasional yaitu meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan Yang Maha Esa, berilmu, akhlak mulia, berkreaktif dalam melakukan sesuatu, cakap, mandiri dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab.

Ahmad D.Marimba: mengemukakan bahwa tujuan pendidikan ialah suatu proses bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, yang tujuannya agar kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul. Kepribadian yang dimaksud ini bermakna cukup dalam yaitu pribadi yang tidak hanya pintar, pandai secara akademis saja, akan tetapi baik juga secara karakter. Dari penjelasan di atas bahwa tujuan pendidikan yaitu bagaimana kita bisa membentuk karakter kita baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan lainnya, dan dari kita yang tidak tau sesuatu hal tersebut menjadi tau, contohnya seperti tatacara berbicara, lebih menghormati yang lebih tua, dan kita mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dalam berhubungan sosial bersama masyarakat.

## **2.3. Pembelajaran Daring**

### **2.3.1. Definisi Pembelajaran Daring**

Pembelajaran daring Adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran atau pun jejaring sosial Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka , tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara *online*. Sistem pembelajaran

melalui daring ini dibuat dengan beberapa aplikasi seperti, *google meet*, *google zoom* dan bahkan menggunakan *whatsapp*.

Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1). Di bawah kendalih langsung dari alat lainnya. 2). Di bawah kendalih langsung dari sebuah sistem. 3). Tersedia untuk penggunaan segera atau real time. 4). Tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya. 5). Bersifat fungsional dan siap melayani. Selama pelaksanaan pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, peserta didik juga dapat berinteraksi dengan waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message.

Pembelajaran daring memiliki tantangannya tersendiri. Siswa/siswi tidak hanya membutuhkan suasana dirumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Namun ,proses pembelajaran yang efektif juga tak kalah penting. Berikut ini tips agar siswa belajar dalam jaringan dengan efektif. 1). Komunikasi antara tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call. 2). Aktif dalam berdiskusi baik dengan tenaga pengajar atau pun dengan teman-teman. 3). Managemen waktu bagi para siswa sangat penting. Meski belajar di rumah pastikan siswa/siswi membuat catatan mana saja tugas yang harus segera kamu selesaikan. 4). Jangan lupa untuk

tetap bersosialisasi dengan orang lain, termasuk anggota keluarga di rumah, serta teman-teman sekelas diluar sesi video call untuk mengasah kemampuan bersosialisasi.

Rosenberg (dalam surya, 2002, 18), pembelajaran daring merupakan salah satu pemanfaatan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan tiga kriteria yaitu:

- a).Pembelajaran daring merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, penyimpanan, mendistribusikan, dan membagi materi ajar atau informasi.
- b).Pengiriman sampai kepenguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar.
- c).Memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran dibalik paradigma pembelajaran tradisional.

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dapat disebut sebagai suatu daring. Disimpulkan juga bahwa pembelajaran daring adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik dengan salah satu media yang menggunakan jaringan adalah jaringan komputer yang memungkinkan untuk dikembangkan.

### 2.3.2. Manfaat Pembelajaran Dalam Jaringan

Manfaat belajar online atau pembelajaran dalam jaringan antara pembelajar satu dengan pembelajar lainnya yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, belajar juga dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing siswa, pembelajaran daring ini interaksi akademis antara guru dan siswa tidak terbatas, bahkan bisa dilakukan sampai waktu 24 jam, sehingga ini dapat meningkatkan kualitas belajar siswa meningkat. Dan disini juga guru memiliki tugas yaitu dimana guru harus melihat dari postingan para siswanya dan memberikan masukan dari tugas yang telah diposting oleh siswa tersebut.

Disini ada beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh siswa/siswi dalam pembelajaran daring yaitu, *google classroom*, *google meet*, *zoom* dan bahkan menggunakan whatsapp, Aplikasi yang paling sering digunakan dalam pembelajaran dalam jaringan ini yaitu whatsapp. Whatsapp merupakan sebuah aplikasi untuk Smartphone pesan instan, jika dilihat dari fungsinya whatsapp hampir sama dengan aplikasi sms lainnya biasanya kita menggunakan di ponsel lama, tetapi whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Jadi di aplikasi ini kita tak perlu khawatir panjang pendeknya karakter yang kita buat. Hampir diseluruh kegiatan komunikasi antara kita dan keluarga selalu menggunakan aplikasi ini bahkan dalam kegiatan belajar mengajarpun juga menggunakan whatsapp ini. Terutama dalam kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Para siswa/siswi di SMA Negeri 3 Sape

banyak sekali menggunakan aplikasi whatsapp ini dikarena sangat mudah baik dalam penggunaan maupun dalam koneksi internetnya.

### **2.3.3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan produser dan menejemen pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan suatu kompetensi dasar yang di tetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dari silabus. Seperti yang telah dikemukakan oleh permendikbud RI No.18 Tahun 2013, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara terperinci oleh materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rusman,(2012,4), proses perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

#### **a). Silabus**

Silabus sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran memuat identitas mata pelajaran atau tema pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.

## **b). Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)**

Rencana pelaksanaan pembelajaran di jabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara intraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.

## **c). Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)**

- 1.) identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pembelajaran, serta jumlah pertemuan.
- 2). standar kompetensi, merupakan kualitas kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran.

Mengenai pernyataan di atas pembelajaran merupakan Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan

divisualisasikan sabagai serangkaian tahap yang saling bergantung di atur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan. Adopsi kebijakan, impelementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Sedangkan Menurut Hamzah b. uno, (2006:3-5) harus ada Perlunya perencanaan pembelajaran sebagaimana, dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

- 1). Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang di wujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Perbaikan kualitas pembelajaran haruslah diawali dengan perbaikan desain pembelajaran, perencanaan pembelajaran dapat di jadikan titik awal dari upaya perbaikan kualitas pembelajaran.
- 2). Untuk merancang suatu pembajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Pembelajaran dirancang dengan pendekantan sistem, untuk mencapai kualitas pembelajaran, desain pembelajaran yang dilakukan haruskah didasarkan pendekatan system. Hal ini didasarkan bahwa dengan pendekatan sistem, akan memberikan peluang yang lebih besar dalam mengintegrasikan semua variabel yang mempengaruhi belajar, termasuk keterkaitan antara variabel pengajaran yakni variabel kondisi pembelajaran, variabel metode, dan variabel hasil pembelajaran.
- 3). Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran,

dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Desain pembelajaran harus diacukan pada tujuan, hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan hasil tak langsung (pengiring).

4). Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Desain pembelajaran di arahkan pada kemudahan belajar, sebagaimana disebutkan diatas, pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa dan perancangan pembelajaran merupakan penataan upaya tersebut agar muncul prilaku belajar. Dalam kondisi yang ditata dengan baik, strategis yang direncanakan akan memberikan peluang dicapainya hasil pembelajaran.

5).Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Desain pembelajran melibatkan variabel pembelajaran, desain pembelajaran diupayakan mencakup semua variabel pembelajaran yang dirasakan turut mempengaruhi belajar. Ada tiga variabel pembelajaran yang perlu di pertimbangkan dalam merancang pembelajaran. Ketiga variabel tersebut adalah variabel kondisi, metode, dan variabel hasil pembelajaran.

## **2.4. Kebijakan publik**

### **2.4.1. Definisi kebijakan publik**

Kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kebijakan publik serta dapat di terimah publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahap perencanaan dan

formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetap jika pada tahapan implementasinya tidak di perhatikan optimisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahap evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Lingkup dari studi implementasi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupu lokal seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsih, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Teori George Kebijakan (2003) Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

#### 1). Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok

sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

## 3). Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. berbagai khusus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga. Seperti contoh indonesianya konkrit dari rendahnya

komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undang yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

#### **2.4.2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan publik**

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008 : 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

a).Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standars objecties*).

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-

indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b). Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

c). Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional  
(*Interorganizational Communication and enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi ke bawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak.

d).Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*).

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e).Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- 1).Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.

- 2). Sejahtera atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3). Bagaimana sifat umum ; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
- 4). Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- 5). Apakah karakteristik partisipasi dari organisasi pelaksana ; ada oposisi atau dukungan partisipasi untuk kebijakan tersebut.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

a). Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali,

sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b). Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

c). Tahap implementasi kebijakan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

d). Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang

telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

### **2.4.3. Faktor-Faktor Mempengaruhi dalam Pembuatan kebijakan publik.**

Suharno ( 2010 ) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dibayangkan, rumit dan kompleks yang sangat sulit.

- a). Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b). Adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c). Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d).Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

#### **2.4.4. Urgensi Kebijakan Publik**

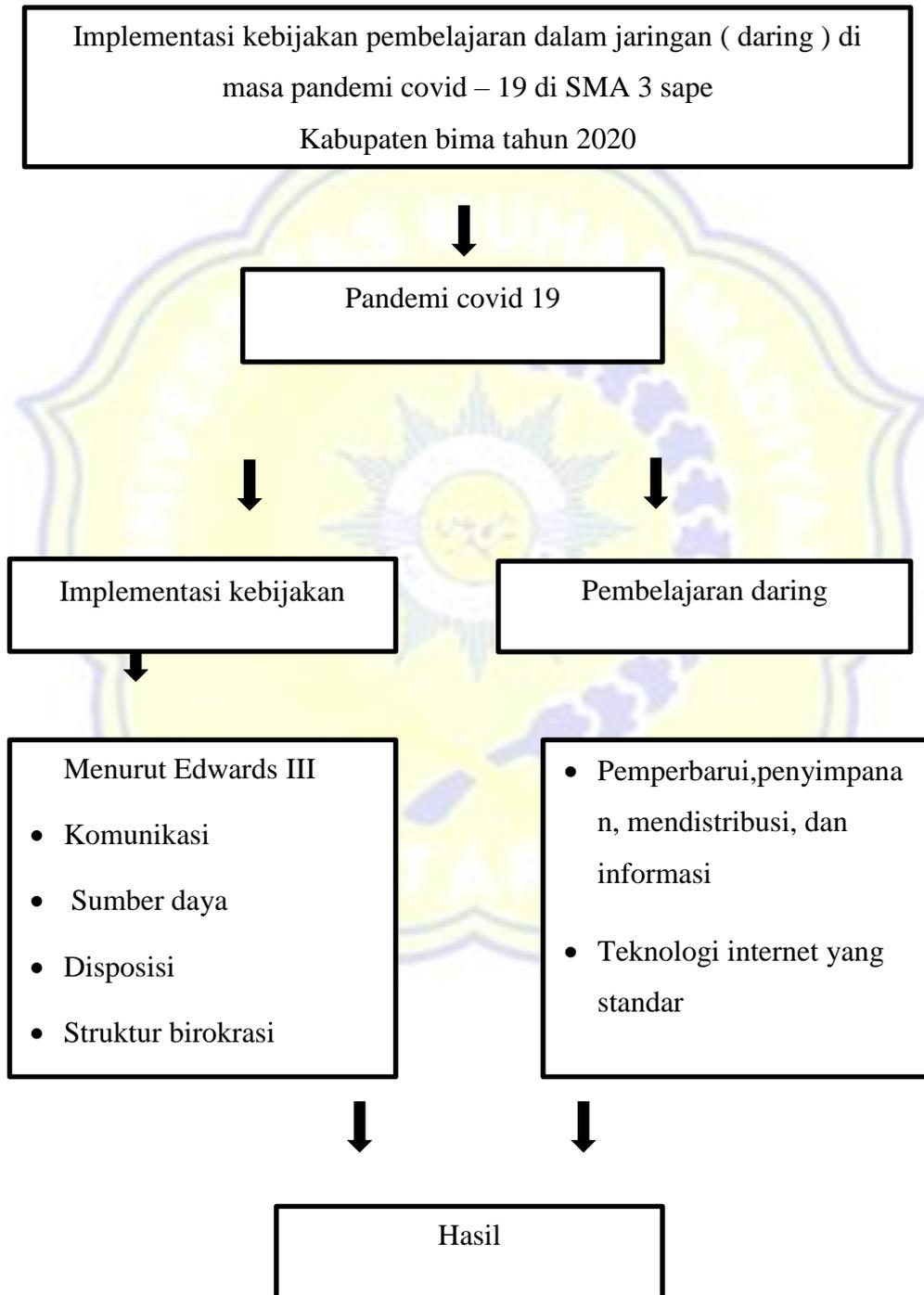
Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab ( Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: “Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan- kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

- a). Alasan Ilmiah
- b).Alasan professional
- c).Alasan Politik

## 2.5. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat di simpulkan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat dijadikan suatu kerangka berpikir, implementasi kebijakan adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk praktis yang mana menimbulkan dampak, baik berupa perubahan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, maupun nilai dan sikap, terkait dengan implementasi kebijakan pembelajaran dalam jaringan (daring) di masa pandemi *covid-19* di SMAN 3 Sape. Secara sederhana pembelajaran daring dapat difahami sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi sarana komunikasi,

## 2.6. Definisi Konseptual

- a). Pandemi *covid-19* adalah penyakit corona (*covid-19*) suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan, sebagian besar orang yang tertular *covid-19* akan mengalami gejala ringan sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau diabetes).
- b). Pembelajaran daring merupakan salah satu pemanfaatan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan tiga kriteria yaitu: a). pembelajaran daring merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi.

c).Pengiriman sampai kepengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. c).Memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran dibalik paradigma pembelajaran tradisional.

## **2.7. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengatur variabel. Definisi oprasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi oprasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau didapat melihat definisi oprasional merupakan suatu penelitian maka seseorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian dan lokasi penelitian. Adapun jenis dari penelitian kualitatif ini ialah; studi dokumentasi/teks, observasi alami, wawancara terpusat.

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Sape yang beralamat di jln lintas sape wera, desa buncu, kecamatan sape kabupaten bima.

##### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 12, April 2021 sampai dengan tanggal 01, Mei, 2021 di SMA Negeri 3 Sape, Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

#### **3.3. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris (Silalahi Ulber, 2009). Kemudian menurut (Rahman, 2009), bahwa penelitian selain menggunakan metode yang tepat, juga memilih tehnik dan pengumpulan data yang relevan. Adapun beberapa tehnik

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

### **3.3.1. Observasi**

Suharsimi arikunto, (2010) observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan alat indra, observasi dilakukan juga untuk mengetahui tindakan guru selama proses pembelajaran dasar pola., komite, gurru beserta murid d SMAN 3 Sape, sebagai narasumber yang akan diwawancarai kemudian mendokumentasikan.

### **3.3.2. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden (Gulo,2010). Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan memih responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan informan di atas, yaitu kepala sekolah, komite dan guru serta siswa/siswi di SMA Negeri 3 Sape.

### 3.3.3. Dokumentasi

Sulistyo basuki, ( 2004 ) mengartikan dokumentasi sebagai pekerjaan mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen litereter yang mencatat segala aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan sebagai bahan dan penerangan mengenai berbagai soal. Peneliti menggunakan tehnik ini untk obsrvasi, wawncara kepek, guru dn murid, srta memperoleh dta profl sekolh SMAN 3 Sape Kabupaten Bima.

### 3.4. Sumber Data

Nur indrianto dan Bambang Supomo, ( 2013 ) sumber data adalah merupakan faktor penting menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang dibuat dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut di peroleh. Sumber utama data dalam metode penelitian ini ialah kualitatif yaitu kata-kata dan aktivitas, adapun selain itu seperti dokumen, berkas, tulisan merupakan data tambahan.

#### 3.4.1. Sumber Data Primer

Hasan (2002;82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikmpulkan langsung dilapangan olh orang yang melakukan penelitian yang bersangkutan memerlukannya.data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang

terkait dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, komite, guru dan siswa/siswi di SMA Negeri 3 Sape Kabupaten Bima.

### **3.4.2. Sumber Data Sekunder**

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data yang pertama. Dapat juga dikatakan yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dan dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber data sekunder. Hasan (2002;58) data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah yang diperoleh yaitu dari bahan pustaka.

### **3.5. Tehnik Analisa Data**

Analisa data pada dasarnya ditunjukkan untuk menyederhanakan suatu hasil penelitian yang pada akhirnya mudah untuk ditafsirkan (Muhammad, Nazir: 2013) merupakan bagian yang amat sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

#### **3.5.1. Reduksi Data**

( Sugiyono 2015;249 ) reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menguraikan, yang membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan begitu banyak semakin lama kita melakukan penelitian dan semakin banyak pula data yang kita dapatkan.

### **3.5.2. Display**

Merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang menjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Buchari Alma (2009:30) display ialah keinginan membeli sesuatu, yang tidak didorong oleh daya tarik, atau oleh penglihatan ataupun oleh perasaan lainnya.

### **3.5.3. Verifikasi**

Morse (2002) proses memeriksa, mengonfirmasi, memastikan, dan memastikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.